

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan 3 jenis koordinasi yang menjadi fokus penelitian yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi fungsional. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Koordinasi vertikal

Pada proses penyusunan RKPDes Desa Tamiajeng kepala desa selaku pemimpin dalam pemerintahan desa melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa termasuk masyarakat desa. Selain itu, proses penyusunan RKPDes Desa Tamiajeng berjalan sesuai ketentuan/peraturan pemerintah yakni yang menjadi rujukan penyusunan RKPDes adalah hasil musyawarah desa dan koordinasi vertikal yang dibangun oleh pemerintah Desa Tamiajeng sudah cukup baik. Adanya koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan perangkat dalam proses penyusunan RKPDes Desa Tamiajeng melalui rapat persiapan yang diselenggarakan oleh kepala desa.

b. Koordanas horizontal

Dalam koordinasi horizontal terbagi menjadi 2 yaitu koordinasi antara kepala desa dengan BPD dan koordinasi antar kepala seksi dan kepala urusan desa. Pertama, koordinasi antara kepala desa dan BPD sudah

terjalan dengan baik karena keduanya merupakan mitra kerja di desa. Selain itu, keaktifan BPD dalam proses penyusunan RKPDes yang di bahas dalam musyawarah desa (Musrembangdes).

Kedua, koordinasi antara kepala urusan dan kepala seksi juga sudah berjalan dengan baik. Cara yang digunakan kepala desa guna meningkatkan komunikasi, sinkronisasi dan kerja sama antar perangkat desa dengan mengadakan rapat bulanan. Suatu pembangunan desa dalam berjalan dengan baik apabila ada koordinasi dari berbagai elemen pada pemerintah desa.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional tidak jauh berbeda dengan koordinasi horizontal hanya saja yang membedakan koordinasi yang berjalan memiliki fungsi dan tugas yang sama. Pada proses penyusunan RKPDes ini adanya koordinasi antar sekretaris desa dengan sekretaris BPD yang sudah berjalan baik dengan terlihat adanya koordinasi yang dilakukan keduanya setelah rapat untuk menyampaikan hasil musyawarah desa dari masing-masing pihak. Koordinasi antara keduanya bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

d. Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) selalu didahului dengan melakukan koordinasi antara kepala desa dengan

BPD, perangkat desa dan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes), sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Selain itu, partisipasi masyarakat desa Tamiajeng dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah cukup aktif baik dalam partisipasi langsung dalam musrembangdes ataupun menyalurkan aspirasi melalui BPD.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Koordinasi antara kepala desa, BPD, perangkat desa dan masyarakat perlu dipertahankan dan tingkatkan untuk semua proses pembangunan yang ada di Desa Tamiajeng.
2. Perlu adanya koordinasi sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan sehingga proses perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan bermanfaat dan hasil pembangunan memberikan manfaat pada masyarakat desa.